



Anggaran untuk pernyetaraan Sekolah Negeri dan Swasta

Jumlah penerima kartu pintar untuk tahun ini berjumlah 489.150 orang.

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta menggelontorkan dana Rp 2,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 untuk Kartu Jakarta Pintar. Anggaran ini meningkat dari tahun sebelumnya, yang hanya Rp 790 miliar. Menurut Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budiman, jumlah dana yang cukup besar itu untuk meningkatkan penyediaan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta.

"Hasil pertemuan dengan pakar, pemerhati pendidikan, dan perhimpunan-perhimpunan dalam Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) menghasilkan untuk mengkonkretkan dukungan pemerintah terhadap pendidikan tanpa diskriminasi," kata Arie di Balai Kota, kemarin.

Adapun jumlah penerima kartu pintar untuk tahun ini berjumlah 489.150 orang. Dana kartu pintar untuk tiap siswa dibedakan berdasarkan tingkatannya. Untuk sekolah dasar setiap siswa mendapat Rp 210 ribu per bulan, SMP Rp 260 ribu, SMA Rp 375 ribu, dan SMK Rp 390 ribu tiap bulan.

Sedangkan untuk pelajar di sekolah swasta masing-masing mendapatkan Rp 310 ribu per bulan per siswa, SMP Rp 430 ribu, SMA Rp 665 ribu, dan SMK Rp 630 ribu per bulan per siswa. "Yang jelas untuk tahun ini swasta dengan negeri berbeda karena tiap jenjang swasta ditambah dengan SPP," ujar Arie.

Arie mengatakan, untuk menyetarakan pendidikan swasta dan negeri, Dinas pun mulai memperhitungkan skema untuk komponen sarana dan prasarana serta sistem satuan pendidikan di Jakarta tanpa lagi memperhatikan mana sekolah negeri dan swasta. "Semua sudah dikaji dan sudah masuk program Gubernur. Hal yang masih perlu dipelajari adalah pemberian untuk swasta apakah lewat mekanisme hibah atau apa," tuturnya.

Anggaran Kartu Jakarta Pintar awalnya ditetapkan Rp 3 triliun. Namun, dalam pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggaran dipotong Rp 1,8 triliun. Pemotongan dilakukan dengan alasan pemerintah DKI tak punya data pasti jumlah penerima kartu yang digagas pada era Gubernur Joko Widodo itu. Skema pemberian dana itu pun, menurut Dewan

Seiring kisruh anggaran yang akhirnya menggunakan peraturan gubernur, anggaran kemudian ditetapkan menjadi Rp 2,3 triliun. Arie mengatakan skema pemberian anggaran untuk penerima kartu pintar sudah jelas. Hanya, dia menambahkan, ada penambahan syarat bagi penerima kartu itu. "Siswa harus berperilaku baik," kata Arie beberapa waktu silam. Bagi anak-anak yang bermasalah, seperti bandel, merokok, dan suka berkelahi, tak akan mendapatkan dana itu.

Wakil Ketua Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Ashraf Ali mengatakan seharusnya anggaran kartu pintar setiap tahun menurun. Jika anggaran kartu pintar besar, ujar Ashraf, banyak rakyat Jakarta yang tergolong miskin. "Ini mencerminkan masyarakat masih miskin," ucapnya.

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Jimmy Paat, mengatakan jumlah anggaran kartu pintar yang meningkat sudah dipertimbangkan dengan matang. Dasarnya, kata dia, adalah pengalaman tahun sebelumnya yang banyak salah sasaran. "Mereka sudah ada data, makanya dinaikkan anggarannya."

Namun pembagian program KJP harus terus diawasi. Sebab, bisa saja terjadi salah sasaran lagi dalam pembagiannya. "Kita lihat terus dan awasi," ucapnya.

● AISHA SHAJIDRA | ERWAN HERMAWAN